

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mahmudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama.

Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Imunarso, D. P. (1987). *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.

Lamintang, P. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Huda, C. (2010). Pola Pemberatan Ancaman Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus. *makalah hukum*, 101.

Renggong, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.

Sunaryo, S. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.

- Setiawan. (1992). *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Alumni.
- Napitupulu, P. (2004). *Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*. Bandung: Alumni.
- Mustafa, B. (1982). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Taufani, S. d. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Abdullah, A. (2015). *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Prenadamedia Group.
- Aspani, B. (1986). Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang Undang Nomor 5. *Jurnal Volume 16*, 344-352.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Napitulu, P. (2004). *Peran dan Pertanggungjawaban DPR, Kajian di DPRD Provinsi Jakarta*. Bandung: Alumni.
- Drs. Antar Venus, M. (2009). *Manajemen Kampanye*. Bandung: SImbiosia Rekatama Media.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Haris, S. (n.d.). *Struktur, Proses, dan Fungsi Pemilihan Umum*.

Moeljatno. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Muhadam Labolo, T. I. (n.d.). *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Azhar, M. (2015). *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam", Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*.

Hamidi, J. (1999). *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lotulung, P. E. (2013). *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun)*. Jakarta: Salemba Humanika.

Jurnal:

Riwanto, A. (2020). Model Pengintegrasian Pengakan Hukum Pilkada Serentak Guna Mewujudkan Keadilan Substantif (Evaluasi Pengakan Hukum Pilkada Serentak 2015-2020). *Jurnal Adhyasta Pemilu Volume 7 Nomor 1 tahun 2020*, 63.

Haris, S. (2018). Pemilihan Umum dalam Pandangan Syamsuddin Haris. *Jurnal Panorama Hukum Vol. 3 No. 1* .

Schumpeter, J. A. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi Vol. 17 No 2 Juni 2020*.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang juga mengatur penetapan anggota DPRD.

Lampiran



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**

Jalan Pahlawan No. 19 Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang, Jawa Tengah 50243 www.pt-semarang.go.id, pt.jateng@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 781/KPT.W12-U/HK1.3/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCHAMAD HATTA
NIP : 195905111984031004
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIZKY GUNAWAN
NIM : 11000121140759
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro

Pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 telah melaksanakan Wawancara Pra-Riset di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan dibimbing oleh Hakim Tinggi Ibu Dedeh Suryanti, S.H., M.H. guna penyusunan Skripsi dengan judul "**Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Khusus Terkait Hukuman Masa Percobaan Terhadap Sengketa Pemilu (Studi Putusan Nomor: 108/PID.SUS/2024/PT SMG)**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Juni 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,

MOCHAMAD HATTA



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG**

Jl. Abdulrahman Saleh No. 89 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145
Telp./Fax. (024) 7613310/7607413, e-mail: info@ptun-semarang.go.id
Website: www.ptun-semarang.go.id

Nomor : 680 /KPTUN.W3-TUN2/HM2.14/VI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Jawaban Permohonan Izin Pra Riset

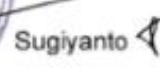
Semarang, 23 Juni 2025

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang
d.a. Jalan dr. Antonius Suroyo Tembalang, Semarang 50275

Menanggapi Surat Saudara Nomor : 582/UN7.F1/AK/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025, Permohonan Izin ^{Pra Riset} Magang, Diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan, mengizinkan pelaksanaan kegiatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mulai Bulan Juni 2025 atas nama :

Nama : Rizky Gunawan
NIM : 11000121140759
Semester : VIII.

Selama melaksanakan kegiatan, mahasiswa harus mengikuti aturan yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


Ketua,

Sugiyanto

